

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan isu krusial di Indonesia sejak dahulu hingga detik ini. Melihat jumlah dan kecenderungannya, kemiskinan di negeri ini tampaknya bukan lagi merupakan kejadian sementara waktu (*transient event*). Melainkan, sudah menjadi fenomena massal yang kronis dan mendalam. Bahkan pada banyak kasus kemiskinan sudah bersifat antar-generasi. Kebijakan pemerintah menggunakan program pengentasan kemiskinan dimulai dari pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat yang beranggotanya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi serta mengurangi beban hidup dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Pemerintah selaku *policy maker* membuat sebuah kebijakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan dalam rangka membuat program-program perlindungan sosial, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk

mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan melakukan upaya untuk melakukan berbagai program yaitu Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Bantuan Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIP) dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) bagi keluarga kurang mampu/miskin melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) dan (2) Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yaitu:

Ayat (1) Penangggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Ayat (2) Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) merupakan program perlindungan sosial yang bisa digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan dana program Perlindungan Sosial yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Kartu Perlindungan Sosial (KPS) diganti dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai dua identitas bagi penerima program Perlindungan Sosial yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi kebutuhan hidup

masyarakat kurang mampu/miskin. Untuk menjalankan program-program perlindungan sosial, pemerintah Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk membangun keluarga produktif. Didalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 terdiri dari 3 program kartu dimana salah satu kartu adalah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menandai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu/miskin. Melalui pelaksanaan program ini, diperkenalkan penggunaan teknologi untuk masyarakat keluarga kurang mampu/miskin agar penyaluran program dapat lebih baik dan efisien. Dengan pelaksanaan ini, pemerintah dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu/miskin dengan perlindungan dan pemberdayaan serta tidak sekadar diberikan bantuan *charity* (amal).

Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan suatu program bantuan yang dirancang pemerintah untuk rakyat miskin dan sebagai penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk Simpanan Keluarga Sejahtera. Program Simpanan Keluarga Sejahtera bagi pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) itu sendiri merupakan program pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa barat, Kabupaten Cirebon jumlah penerima bantuan (Kepala Keluarga) sejumlah 180.110 ribu sudah terealisasi pada tahun 2019 dengan pencapaian 8,23%. Dari total

jumlah penduduk Kabupaten Cirebon menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon berjumlah 2.189.785 jiwa. penyaluran bantuan sejumlah Rp.200.000/Keluarga/Bulan. Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang diberikan dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD) dengan pemberian SIM Card yang berisi *e-money* dan dalam bentuk simpanan giro pos.

Pemerintah sebagai penyalur bantuan menerbitkan Kartu Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari bank BNI, BTN, BRI, dan Mandiri. Kartu KKS menjadi media bersama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial seperti BPNT dan PHK dari Kementerian Sosial, integrasikan penyalurannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kabupaten/Kota Cirebon yang sudah menerapkan program BPNT yaitu berupa penyerahan bantuan, masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), selain akan mendapatkan Bantuan Sosial dari program BPNT peserta tersebut akan secara otomatis terdaftar menjadi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kartu Keluarga Sejahtera merupakan kartu elektronik karena didalamnya terdapat sistem *Saving Account* dan *E-Wallet/Dompot Elektronik* sehingga peserta KPM dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok, apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka 1 bulan maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya. Untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial maka

mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama, Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH).

E-KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/uang secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dalam peraturan ini, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan diberlakukannya metode pencairan bansos non tunai ini menggunakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah upaya mengajak masyarakat untuk berkenalan dengan perbankan, sistem penyaluran non-tunai akan disalurkan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini memiliki fitur *saving account* dan *e-wallet* yaitu suatu kartu yang digunakan berbagai program bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 03 Februari 2021 di Lingkungan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang

Kabupaten Cirebon. Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) telah didistribusikan kepada masyarakat yang terdaftar didalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2017, pendistribusian KKS ini diterbitkan oleh Bank BNI salah satu bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) di kantor Desa Gebang Ilir.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini berjalan dengan semestinya namun dengan demikian, melalui pengamatan peneliti bahwa kebanyakan yang menerima KKS ini notabennya yaitu dari keluarga yang mampu dengan kehidupan yang berkecukupan dan keluarga yang notabennya dari keluarga yang kurang mampu sebagian mendapatkan KKS dan sebagian tidak mendapatkan KKS. Dengan demikian, timbulnya kecemburuan sosial antara keluarga yang kurang mampu dengan keluarga yang mampu, ketidak tepatan dalam penyaluran Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini dan jauh dari tujuan pemerintah dalam program KKS yaitu untuk membantu keluarga yang kurang mampu dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Penelitian yang saya lakukan ini yaitu fokus pada kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) agar tepatnya sasaran dalam penyaluran program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau keluarga yang kurang mampu/miskin. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang judul **“Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya dalam pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga (KKS) di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat proses Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?
3. Apa upaya-upaya yang diambil untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga (KKS) di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat proses Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

3. Untuk mengetahui Upaya-upaya apa saja yang diambil untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara.
2. Hasil dari penelitian guna untuk menambah pengetahuan tentang kebijakan pemerintah, apakah dalam proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi kantor Kuwu Desa Gebang Ilir, dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dengan harapan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dijalankan dengan efektif dan tepat sasaran.
2. Dijadikan sebagai sumber informasi untuk masyarakat mengenai Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat membantu kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu/miskin.

1.6 Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu

kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Menurut Van Metter & Van Horn (dalam Leo Agustino 2020:146) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Teori yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan, peneliti ini menggunakan teori dari Donald Van Metter & Van Horn. Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van metter & van horn disebut istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Metter & Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu : (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana, (5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Variabel pertama, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn adalah Ukuran dan Tujuan Kebijakan, menurut lebih lanjut kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Variabel kedua, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan menurut Van Metter & Van Horn adalah Sumber Daya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Variabel ketiga, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan menurut Van Metter & Van horn adalah Karakteristik Agen Pelaksa, Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal

dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi pelaksanaannya.

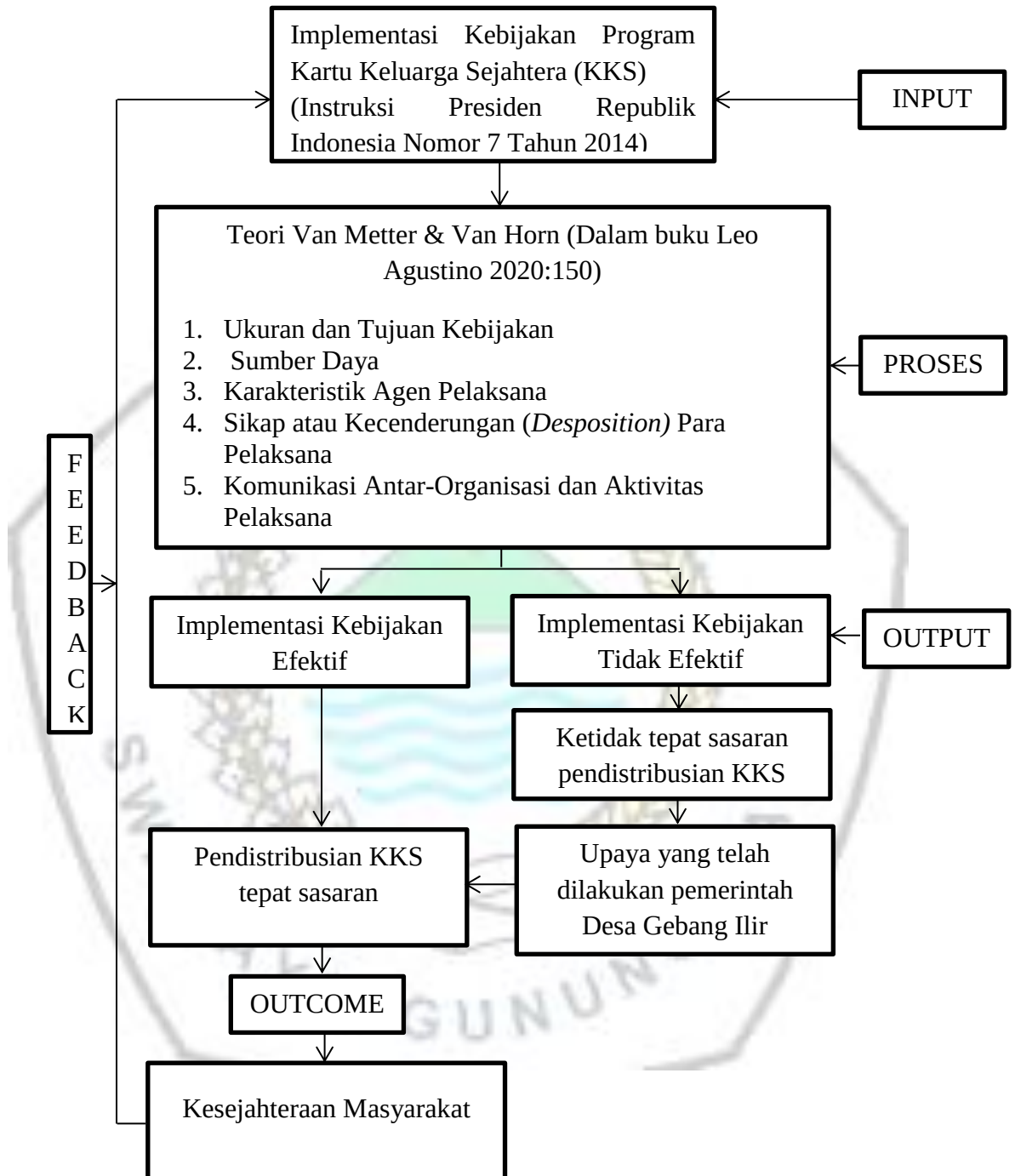
Variabel keempat, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan menurut Van Metter & Van Horn adalah Sikap atau Kencenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana, Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Variabel kelima, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan menurut Van Metter & Van Horn adalah Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Variabel keenam, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan menurut Van Metter & Van Horn adalah Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Pendekatan *top down* yang dirumuskan oleh Van Metter & Van Horn sesuai dengan Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam implementasi kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, ada beberapa faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak efektif, ketidaktepat sasaran dalam pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada keluarga yang kurang mampu, sosialisasi tentang program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada masyarakat kurang maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasional Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut:

- 1) Implementasi berkenan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpersikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. (Gordon dalam Posolong (208:58) dalam Mulyadi Dedy 2016:24).
- 2) Kebijakan adalah 'keputusan tetap' yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mempatuhi keputusan tersebut. (Eulau & Prewitt (1973:465) dalam Leo Agustino 2020:15).
- 3) Implementasi kebijakan sebagai pelaksana keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk

mengatur proses implementasinya. (Mazmanian & Sabatier (1983:61) dalam Leo Agustino 2020:146).

- 4) Peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun keluarga produktif. Menegaskan bahwa Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menandai peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien supaya dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Bahwa penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif.
- 6) Program adalah kata, ekspresi atau pertanyaan yang disusun dan diangkat menjadi satu kesatuan prosedur berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang di implementasikan sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan.

- 7) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melakukan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua yang terlihat dan akhirnya mempengaruhi dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan berdasarkan variabel kebijakan.

Sehingga operasionalisasi konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan tersebut kemudian menjadi parameter-parameter. Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka konsep penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu: Implementasi Kebijakan yang di operasionalkan atau dijabarkan kedalam parameter seperti data terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep Penelitian	Dimensi	Parameter
Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Leo Agustino 2020:150)	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	1. Kriteria menentukan kepesertaan program KKS. 2. Tujuan kebijakan program KKS.
	Sumber Daya	1. Sumber daya manusia. 2. Sumber daya non manusia.
	Karakteristik Agen Pelaksana	1. Sosialisasi. 2. Skill aparatur
	Sikap/Kencenderungan (Disposisi) Para Pelaksana	1. Motivasi aparaturnya 2. Sikap aparatur
	Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	1. Koordinasi. 2. Kerjasama.
	Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	1. Faktor ekonomi. 2. Faktor Sosial.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode penelitian yang digunakan

Metode Deskriptif Kualitatif penelitian terhadap permasalahan yang sedang terjadi dengan pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2019:8) merupakan metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah, pengambilan sumber data atau teknik pengumpulan data bersifat triangulasi yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Metode yang penulis gunakan untuk penelitian adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara interaktif alasan penulis menggunakan metode kualitatif bahwa penelitian yang digunakan untuk mengetahui kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah efektif atau belum efektif dan mencari faktor penghambat dalam kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bukan untuk mencari seberapa besar pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain tetapi, penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk menggali, menemukan dan menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dalam ketepatan sasaran dalam penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada keluarga kurang mampu/miskin.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Penelitian kualitatif hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah teknik pemilihan informan, maksud dan teknik pemilihan informan adalah untuk mencari sebanyak mungkin informan yang didapat dari berbagai macam sumber. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive (*purposiv sampling*) yang dimana penentuan informan dipilih dengan pertimbangan khusus dari peneliti dengan mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisa dalam penelitian ini.

Pertimbangan orang-orang sebagai informan pada penelitian ini yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung dari Kepala Desa Gebang Ilir, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Program BPNT, Ketua Penyaluran Bantuan Dari Program PKH dan BPNT, masyarakat/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Keluarga non KPM atau yang tidak mendapatkan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Gebang Ilir. Dengan alasan, peneliti mendapatkan informasi mengenai penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Informan penelitian ini terdiri dari:

1. Key Informan (Informasi Kunci)

Informan kunci adalah informan yang menguasai tentang permasalahan Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu: Kuwu/Kepala Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

2. Informan Pendukung

Informan pendukung ialah orang-orang diluar informan yang dapat memberikan informasi lengkap atau informasi tambahan yaitu: Pendamping program PKH dan BPNT, Ketua penyalur program PKH dan BPNT, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Keluarga Non Penerima Manfaat (KPM).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu mempelajari dan menelaah berbagai sumber bacaan seperti: buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang dibahas.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa teknik diantaranya:

- a. Observasi atau pengamatan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk mengamati secara kualitatif berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi. Teknik ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dari sistem fenomena yang diselidiki dimana observasi langsung yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian, pelaksanaannya langsung dimana suatu peristiwa terjadi dan adapun sistem yang dipilih dan ditetapkan pada observasi langsung adalah dimana kedudukan penelitian hanya sebagai pengamat bukan anggota sepenuhnya dari obyek yang sedang diteliti.

b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan para informan, wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terpimpin/terstruktur yang dilakukan dengan cara mendalam (*deph interview*). Kedalaman wawancara ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan diperoleh data atau informasi yang benar-benar lengkap sehingga peneliti melakukan analisis dengan tujuan dan mendalam.

c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data berdasarkan laporan-laporan dokumentasi yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Menggunakan metode wawancara kepada informan yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada yang berkepentingan.

2. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara mencari data-data yang tersedia yang diperlukan oleh penyusun sebagai referensi dan bahan acuan penelitian, seperti bahan-bahan referensi, studi kepustakaan melalui literatur-literatur yang dibutuhkan penulis.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moelong (2017:330), Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan cara *check*, *recheck* dan *crosscheck* terhadap data itu.

Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Penelitian kualitatif, suatu data dikatakan absah akurat jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. ada kesamaan data dari hasil dengan para informan, data dinyatakan akurat jika untuk pertanyaan yang sama diperoleh data atas jawaban yang sama dari informan, jika jawaban informan berbeda-beda maka data itu belum akurat/absah. Peneliti harus melakukan triangulasi dengan cara *check*, *rescheck*, *cross check* sampai diperoleh data atau informasi yang sama.
- b. Ada kesamaan data antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan jika data hasil wawancara dengan pengamatan itu tidak sama, maka data itu tidak absah atau akurat. Peneliti harus melakukan triangulasi lagi dengan cara *check*, *rescheck*, *cross check* sampai diperoleh data atau informasi yang sama.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam, data deskriptif yang diperoleh dari data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moloeng 2017:280).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dirinci secara sistematis, kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus dan masalah penelitian. Dengan kata lain, reduksi data adalah memilih dan memilah data yang diperoleh, data yang telah direduksi diharapkan memberikan gambaran yang lebih tajam, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

2. Display Data

Ialah menyajikan data dalam bentuk uraian, gambar, tabel dan sebagainya, dalam display data ini hanya data yang relevan dengan pasti dan masalah penelitian yang dijadikan.

3. Verifikasi Data

Yaitu peneliti berusaha memperoleh makna dari berbagai data yang dikumpulkan kemudian dibuat pola, model, tema, hubungan dan permasalahan terhadap hal-hal yang sering muncul.

4. Penarikan Kesimpulan

Yaitu menyimpulkan secara logis berdasarkan reduksi dan display data serta verifikasi diatas.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya masalah mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
2. Data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh.
3. Letak lokasi sangat terjangkau oleh penulis dalam proses penelitian skripsi.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dilakukan selama 5 bulan dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2021, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2

Jadwal Penelitian

[illegible]